



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### RLPPD 2025

#### 1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan potret menyeluruh yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Keberhasilan ini tidak berdiri sendiri, melainkan hasil sinergi kolektif dari berbagai program strategis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pembangunan nasional.

Indikator makro ini mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan yang telah diimplementasikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Melalui sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, Provinsi Jawa Tengah telah berupaya mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Atas hal tersebut capaian kinerja makro yang diperoleh Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel.1 Capaian Makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Tahun 2024	Tahun 2025	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,87%	74,77%	1,22%
2	Persentase Penduduk Miskin	9,58%	9,39%	-1,98%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,78%	4,66%	-2,51%
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,95%	5,37%	8,48%
5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rp 47.970.480,00	Rp 50.823.640,00	5,95%
6	Ketimpangan Pendapatan	0,364%	0,35%	-3,85%

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

## 2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang waktu senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, utamanya melalui penguatan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan data makro yang telah disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah, secara umum kinerja Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren positif yang signifikan. Capaian ini tercermin dari keberhasilan dalam pemenuhan Urusan Wajib berkaitan Pelayanan Dasar sebagai berikut:

### 1. Urusan Pendidikan

#### A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	92,71	89,23
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	99,53	94,94
3	Persentase toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	n/a	65,42
4	Persentase ruang kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	n/a	59,93

Keterangan:

n/a: Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator baru.

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp. 3.363.824.753.000 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Paket Pendidikan Gratis;
- 2) peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi;
- 3) Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan;
- 4) Penanganan Bullying yang tuntas menuju Jawa Tengah Zero Bullying melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- 5) Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa; dan
- 6) Menyiapkan Sistem Pendidikan Menengah untuk menciptakan Kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja.

### C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi Urusan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Akses layanan pendidikan menengah dan khusus belum optimal;
- 2) Mutu pendidikan belum memadai; dan
- 3) Relevansi pendidikan masih kurang.

## 2. Urusan Kesehatan

### A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan Kesehatan yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	1,22	1,289
2	Persentase Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi Paripurna	100 %	87,50 %
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100 %	100 %

4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa provinsi	100 %	100 %
---	---	-------	-------

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp 558.030.568.263,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin;
- 2) Percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil;
- 3) Jambanisasi 100%;
- 4) Spesialis keliling (Speling);
- 5) Cek kesehatan gratis (CKG);

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Kasus stunting;
- 2) Gizi buruk dan malnutrisi;
- 3) Masih tingginya kasus kematian ibu, bayi dan balita;
- 4) Masih tingginya penyakit menular (TB, DBD, HIV/AIDS) dan penyakit tidak menular (DM, hipertensi, kanker) karena gaya hidup tidak sehat;
- 5) Prevalensi gangguan jiwa yang cukup tinggi dan kurang mendapat perhatian, dan pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar.

### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan provinsi	n/a	22,771%
2	Tingkat kemantapan jalan	91,47%	94,01%

3	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	n/a	23,81%
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	100%
5	Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	0	0
		*) tidak memiliki SPALD Regional	
6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	n/a	90,54%
7	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di provinsi	n/a	75%

Keterangan:

n/a: Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator baru.

#### B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi Realisasi belanja Urusan PUPR di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp 1.329.939.33.670,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Prioritas Ketahanan Pangan, Energi, dan Air melalui Pembangunan SPAM Regional Wosusokas;
- 2) Kegiatan Prioritas Kemiskinan melalui pembangunan SPAM Desa;
- 3) Kegiatan Prioritas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Rehabilitasi Jalan Jepara – Keling, dan melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang.
- 4) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
- 5) Program pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- 6) Program Penyelenggaraan Pentaan Ruang.

#### C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan terkendala oleh dokumen administrasi pendukung, seperti rekomendasi yang belum terbit atau dokumen kajian dari Tim Ahli;
- 2) Kesepakatan lintas sektoral sering memerlukan waktu lebih panjang;
- 3) Cuaca yang dinamis, terlebih pada musim penghujan dengan curah hujan tinggi menghambat pelaksanaan konstruksi; dan
- 4) Kompleksitas tata ruang yang memerlukan waktu lebih untuk koordinasi dan sosialisasi.

#### 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

##### A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERAKIM) yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Indikator Kinerja Kunci Urusan PERAKIM

No	Indikator Kinerja Kunci	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%
3	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	35,867%	129,43%

Pada pelaporan Tahun 2025 terhadap penyelenggaraan Tahun 2024, luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani oleh Provinsi Jawa Tengah yang dilaporkan merupakan pelaksanaan di Tahun 2024 saja, sehingga Nilai Capaian Kinerja Tahun 2024 lebih kecil dibandingkan Tahun 2025.

##### B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan

Realisasi belanja Urusan PERAKIM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp 45.442.107.587,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (BANKEUPEMDES)
- 2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;

- 3) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha; dan
- 4) Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

### C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan PERAKIM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Angka *Backlog* Kelayakan dan *Backlog* Kepemilikan di Provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi;
- 2) Penanganan Rumah Terdampak Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah belum menjadi prioritas penanganan APBD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan SPM;
- 3) Dinamisnya luas kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah akibat ketidakteraturan dalam penataan kawasan permukiman; dan
- 4) Kualitas Infrastruktur permukiman dasar masih terbatas.

## 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Indikator Kinerja Kunci Urusan Trantibum Linmas

No	Indikator Kinerja Kunci	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100%	100%
2	Persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	100%
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100%	100%
4	Persentase penanganan pra bencana	100%	100%
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%
6	Persentase penanganan pasca bencana	n/a	100%

Keterangan:

n/a: Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator baru.

## B. Realisasi Belanja Urusan Trantibum Linmas

Realisasi belanja Urusan Trantibum Linmas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp 21.806.914.834,00 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Kegiatan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
  - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
  - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
  - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- 3) Program Penanggulangan Bencana
  - Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
  - Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  - Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

## C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Trantibum Linmas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Lemahnya kesadaran masyarakat atas pentingnya ketentraman dan ketertiban umum dan kesiapsiagaan bencana
- 2) Masih banyak daerah rawan bencana yang perlu peningkatan kapasitas penanggulangan bencana
- 3) Keterbatasan sumber daya aparatur
- 4) Masih perlu peningkatan koordinasi dan sinergi antar instansi terkait, termasuk dalam pengintegrasian data sistem informasi

## 6. Urusan Sosial

### A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Sosial yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel. 7 Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	n/a	100%

Keterangan:

n/a: Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator baru.

#### B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp. 80.042.523.000 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

##### 1) Program Rehabilitasi Sosial

- Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas terlantar di dalam panti
- Rehabilitasi Sosial anak terlantar di dalam panti
- Rehabilitasi Sosial lanjut usia terlantar di dalam panti
- Rehabilitasi Sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti

##### 2) Program Penanganan Bencana

- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah

#### C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) UPT Dinas Sosial dalam menentukan kode rekening belum disesuaikan komponen sub kegiatan SPM
- 2) Kompetensi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM belum memadai
- 3) SPM bidang Sosial belum menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- 4) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi sasaran/ indikator kinerja SPM bidang sosial

### **3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

#### **A. Hasil EPPD Tahun 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah memperoleh skor dengan status kinerja **Tinggi**. Hasil tersebut menempatkan Provinsi Jawa Tengah pada peringkat 6 (enam) secara nasional dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi yang dinilai.

B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Berdasarkan Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor 116/S/XVIII.SMG/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, Provinsi berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi. Atas capaian ini berarti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh Opini WTP sebanyak 13 (tiga belas) kali berturut-turut.

### **4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH (BPKAD)**

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (*Unaudited*) Realisasi Pendapatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp 23.761.968.977.877,00 atau 96,38% dan Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 23.871.838.129.256,00 atau mencapai 94,61%. Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 8 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	15.699.284.656.000,00	14.973.131.878.336,00	95,37
4.2	Pendapatan Transfer	8.792.120.753.000,00	8.625.363.756.508,00	98,10
4.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	163.185.839.000,00	163.473.343.033,00	100,18
Jumlah		24.654.591.248.000,00	23.761.968.977.877,00	96,38

Tabel. 9 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1	Belanja Operasi	16.131.580.750.000,00	15.480.092.183.316,00	95,96
5.2	Belanja Modal	1.998.205.719.000,00	1.795.558.675.999,00	89,86
5.3	Belanja Tak Terduga	25.000.000.000,00	7.192.800.000,00	28,77
5.4	Belanja Transfer	7.076.818.456.000,00	6.588.994.469.941,00	93,11
Jumlah		25.231.604.925.000,00	23.871.838.129.256,00	94,61

## 5. INOVASI DAERAH (BRIDA)

Hasil penilaian Indek Inovasi Daerah Tahun 2025 oleh Kemendagri, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke-5 dengan skor indeks sebesar 82,63 dan berpredikat Sangat Inovatif. Database Inovasi Daerah oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 mencatat 137 Inovasi dari 42 Perangkat Daerah di Jawa Tengah. Adapun inovasi unggulan diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	DINKES	PAIJO GR	Peningkatan Akses Layanan dan Informasi Kesehatan Jateng Online dengan Gotong Royong
2	RSUD dr. REHATTA	SIAGA YA MAS (Sistem Ambulance Jaga Pelayanan Maternitas)	Aplikasi untuk melayani penjemputan pasien gawat darurat maternitas menggunakan ambulance bagi pasien yang membutuhkan pelayanan tindak lanjut di FKRTL RSUD dr. Rehatta.

3	DISDIKBUD	Jateng Pintar	Portal pendidikan inovatif dan "one stop service" dari BPTIK Dikbud Provinsi Jawa Tengah yang menyediakan sumber belajar, materi pembelajaran (PAUD hingga SMA), karya siswa, dan sistem pelatihan daring. Platform ini bertujuan meningkatkan pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi informasi, berbagi karya, dan memamerkan prestasi siswa, guru, serta sekolah di Jawa Tengah
4	DISHUB	Sistem Informasi Pelayanan Trans Jateng (SIANTENG)	Aplikasi mobile resmi yang dirancang untuk memudahkan penumpang BRT Trans Jateng. Aplikasi ini menyediakan layanan real-time untuk memantau posisi bus, jadwal kedatangan, informasi rute, serta pembelian tiket secara cashless.
5	DISNAKERTRANS	MTU GERCEP MAS DE (Gerakan Cepat Pelatihan Masuk Desa)	Kerja yang mobile dan berbasis kompetensi untuk menjangkau masyarakat desa tertinggal. Konsep rancang bangunnya terdiri dari unit kendaraan pelatihan yang dimodifikasi lengkap dengan peralatan praktik sesuai kejuruan (menjahit, otomotif, listrik, furniture), kurikulum berbasis standar kompetensi (160 jam pelatihan), serta skema pelatihan langsung di desa dengan memanfaatkan balai desa atau ruang publik lainnya.
6	BAPENDA	SAMSAT Badan Usaha Digital Mandiri (SAMSAT BUDIMAN)	Inovasi Pemprov Jateng yang menggandeng BUMDes/Badan Usaha untuk layanan pajak kendaraan (PKB) 1 tahunan dan pengesahan STNK secara digital. Prosesnya online, praktis, dan cepat melalui BUMDes resmi, mempermudah warga Jateng tanpa perlu antri di kantor Samsat.

Semarang, 30 Maret 2026  
Gubernur Jawa Tengah

Drs. Ahmad Luthfi, Sh, S.St.Mk

